



RENCANA KERJA (RENJA)
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
TAHUN ANGGARAN 2022

PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN PASAMAN BARAT
TAHUN 2021



BUPATI PASAMAN BARAT
PROVINSI SUMATERA BARAT

PERATURAN BUPATI PASAMAN BARAT
NOMOR 32 TAHUN 2021

TENTANG
RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PASAMAN BARAT,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 104 ayat (2) Peraturan Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2022;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Dharmasraya, Kabupaten Solok Selatan dan Kabupaten Pasaman Barat di Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 153 Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4348);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10)
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2022;
13. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Sumatera Barat Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2008 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 27);
14. Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 20 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2022;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 7 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Pasaman Barat tahun 2005-2025;
16. Peraturan Bupati Pasaman Barat Nomor 29 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2022;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2022.

Pasal 1

Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2022 yang selanjutnya disebut Renja PD Tahun 2022 merupakan dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun sebagai pelaksanaan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2022.

Pasal 2

Renja PD Tahun 2022 sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 berfungsi sebagai dasar acuan penyusunan program, kegiatan dan sub kegiatan tahunan

Perangkat Daerah yang dibiayai dengan anggaran yang tercantum dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2022.

Pasal 3

(1) Sistematika Renja PD Tahun 2022 disusun sebagai berikut:

- a. BAB I PENDAHULUAN
- b. BAB II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU
- c. BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH
- d. BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH
- e. BAB V PENUTUP

(2) Renja PD Tahun 2022 di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat dengan sistematika sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran Peraturan ini merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

Pasal 4

Renja PD Tahun 2022 sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 terdiri dari :

- a. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan;
- b. Dinas Kesehatan;
- c. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
- d. Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman;
- e. Dinas Sosial;
- f. Dinas Tenaga Kerja;
- g. Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
- h. Dinas Ketahanan Pangan;
- i. Dinas Lingkungan Hidup;
- j. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
- k. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Nagari;
- l. Dinas Perhubungan;
- m. Dinas Komunikasi dan Informatika;
- n. Dinas Koperasi, dan Usaha Kecil Menengah;
- o. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
- p. Dinas Pemuda dan Olahraga;
- q. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan;
- r. Dinas Perikanan;
- s. Dinas Pariwisata;
- t. Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan;

- u. Dinas Perkebunan;
- v. Sekretariat Daerah;
- w. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
- x. Inspektorat;
- y. Badan Pengelola Keuangan Daerah;
- z. Badan Aset dan Pendapatan Daerah;
- aa. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
- bb. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia;
- cc. Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran;
- dd. Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
- ee. Rumah Sakit Umum Daerah;
- ff. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;
- gg. Kecamatan.

Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pasaman
Barat.

Ditetapkan di Simpang Empat
Pada tanggal 6 Agustus 2021



Diundangkan di Simpang Empat
Pada tanggal 6 Agustus 2021

PJ. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PASAMAN BARAT,

HENDRA PUTRA

BERITA DAERAH KABUPATEN PASAMAN BARAT TAHUN 2021 NOMOR 32

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami ucapkan kehadiran Allat SWT, karena atas rahmat dan hidayah-Nya Dokumen Rencana Kerja (RENJA) Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pasaman Barat tahun 2021 telah selesai disusun sesuai dengan Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tata cara Penyusunan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah serta Permendagri Nomor 86 tahun 2017 tentang Tata cara perencanaan, pengendalian dan Evaluasi pembangunan daerah, tata cara evaluasi rancangan peraturan daerah tentang rencana pembangunan jangka panjang daerah dan rencana pembangunan jangka menengah daerah, serta tata cara perubahan rencana pembangunan jangka panjang daerah, rencana pembangunan jangka menengah daerah dan rencana kerja Pemerintah Daerah.

Rencana Kerja (RENJA) Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pasaman Barat tahun 2022 tersebut, merupakan salah satu bagian dari dokumen rencana yang diwajibkan untuk disusun dan ditetapkan oleh Kepala Perangkat Daerah yang memuat evaluasi pelaksanaan renja tahun sebelumnya, program – program yang dapat dijadikan pedoman untuk pelaksanaan rincian kegiatannya secara spesifik dan terukur serta dilengkapi dengan indicator kinerja dan pencapaian kinerja.

Sebagai pedoman pelaksanaan program dan kegiatan dalam Renja Tahun 2022 diharapkan dapat direalisasikan sehingga dapat dilihat hasil kegiatannya dalam mencapai Target yang di tetapkan pada perubahan RENSTRA 2016-2021 Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pasaman Barat.

Simpang Empat, 06 Agustus 2021
Kepala Dinas Komunikasi Dan Informatika
Kabupaten Pasaman Barat



EDY MURDANI,SH
Pembina Utama Muda/IV.c
Nip. 19670822 198893 1 004

DAFTAR ISI

COVER

SK PENETEPAN

DAFTAR ISI i

KATA PENGANTAR ii

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Landasan Hukum
- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Sistematika Penulisan

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU

- 2.1 Evaluasi Pelaksanaan RENJA Tahun Lalu dan Capaian RENSTRA OPD
- 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan OPD
- 2.3 Isi-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi OPD
- 2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD
- 2.5 Penelaahan Usulan Program Diskominfo.

BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

- 3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional
- 3.2 Tujuan dan Sasaran RENJA OPD
- 3.3 Program dan Kegiatan

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN OPD

BAB V PENUTUP

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) mengamanatkan bahwa setiap daerah harus menyusun rencana pembangunan daerah secara sistematis, terarah, terpadu, komprehensif, dan responsif sesuai dengan jenjang perencanaan, yakni perencanaan jangka panjang, jangka menengah maupun tahunan. Selain itu, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 juga mewajibkan setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk menyusun Rencana Kerja (Renja) OPD dengan berpedoman kepada Rencana Strategis (Renstra) OPD dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).

Rencana Kerja (Renja) merupakan dokumen perencanaan tahunan yang bertujuan untuk mengoperasionalisasikan RKPD dan meningkatkan capaian kinerja pelayanan kepada masyarakat sesuai tugas pokok dan fungsinya. Renja OPD memuat kebijakan, program dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang dilaksanakan oleh masyarakat. Rencana Kerja Diskominfo Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2020 adalah dokumen perencanaan yang memuat program dan kegiatan yang diperlukan untuk mencapai sasaran pembangunan, dalam bentuk kerangka regulasi dan kerangka anggaran untuk periode 1 (satu) tahun.

Renja Diskominfo Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2021 memuat evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan tahun 2017 dan tahun berjalan, program dan kegiatan, indikator kinerja dan kelompok sasaran serta sumber dana yang dibutuhkan untuk tahun 2021. Sebagai satuan kerja perangkat daerah yang mendukung pemerintah Kabupaten Pasaman Barat di bidang perencanaan pembangunan daerah mempunyai tugas yang sangat strategis antara lain, untuk menjabarkan visi, misi dan program lembaga Diskominfo sesuai tugas dan fungsi lembaga, memberikan pedoman dalam pelaksanaan /operasional yang sudah tertuang dalam Rencana Strategis lima tahunan dan perencanaan tahunan yang

dituangkan dalam Rencana Kerja Tahunan (Renja) dan mewujudkan keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan serta pengendalian.

Selanjutnya, Renja Diskominfo Kabupaten Pasaman Barat yang merupakan penjabaran dari perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2016-2021 akan menjadi landasan dan pedoman bagi penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2021.

1.2. Landasan Hukum

Rencana Kerja (Renja) Diskominfo Kabupaten Pasaman Barat disusun berdasarkan peraturan perundang-undangan berikut:

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
2. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Dharmasraya, Kabupaten Solok Selatan dan Kabupaten Pasaman Barat di Provinsi Sumatera Barat;
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005 – 2025;
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
9. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024;

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 Tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD);
13. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 13 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2010 – 2030;
14. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016 – 2021;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 7 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2005 – 2025;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 18 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Tahun 2011-2031;
17. Peraturan Bupati Pasaman Barat Nomor 44 Tahun 2020 tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2020;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 14 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2016-2021;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 21 Tahun 2016 tentang Penetapan Organisasi Perangkat Daerah;
20. Peraturan Bupati Pasaman Barat Nomor 37 Tahun 2020 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2021.

1.3 Maksud dan Tujuan

Penyusunan Recana Kerja (Renja) Diskominfo Kabupaten Pasaman Barat disusun dengan maksud untuk menyediakan dokumen perencanaaan 1 (satu) tahunan yang memuat program dan kegiatan terukur sebagai dasar untuk penilaian kinerja Diskominfo serta sebagai perangkat untuk menciptakan perencanaan pembangunan yang sinkron pada Tahun 2021.

Adapun tujuan penyusunan Rencana Kerja (Renja) Diskominfo Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2021 adalah sebagai berikut:

1. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah.
2. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah.
3. Administrasi Umum Perangkat Daerah.
4. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah.
5. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah.
6. Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota.
7. Pengelolaan Nama Domain Yang Telah Ditetapkan Oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota.
8. Pengelolaan E-Government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota.
9. Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota.
10. Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi Antar Perangkat Daerah Kabupaten / Kota.

1.4 Sistematika Penulisan

Seperti tertuang dalam Lampiran 6 Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 54 Tahun 2010, maka sistematika penulisan Rencana Kerja (Renja) SKPD adalah sebagai berikut:

BAB 1 : PENDAHULUAN

- 1.1 *Latar Belakang, Menguraikan gambaran umum penyusunan rancangan Renja OPD, pengertian ringkas tentang Renja OPD, proses penyusunan Renja OPD, keterkaitan antara Renja OPD dengan*

- dokumen RKPD, Renstra OPD, dengan Renja K/L dan Renja provinsi, serta tindak lanjutnya dengan proses penyusunan RAPBD.
- 1.2 *Landasan Hukum*, memuat penjelasan tentang undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan daerah, dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang SOTK, kewenangan OPD, serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran OPD.
- 1.3 *Maksud dan Tujuan*, Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan Renja OPD.
- 1.4 *Sistematika Penulisan*, Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Renja OPD, serta susunan garis besar isi dokumen.

BAB II : EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN 2019

- 2.1 *Evaluasi Pelaksanaan Renja OPD Tahun Lalu dan Capaian Renstra OPD*, Memuat kajian (review) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja OPD tahun sebelumnya, capaian Renstra OPD berdasarkan realisasi program dan kegiatan pelaksanaan Renja OPD tahun-tahun sebelumnya.
- 2.2 *Analisis Kinerja Pelayanan OPD*, memuat kajian terhadap capaian kinerja pelayanan OPD berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan dalam SPM, maupun terhadap IKK sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008, dan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007.
- 2.3 *Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah, Berisikan uraian mengenai :*
- 1. Sejauh mana tingkat kinerja pelayanan perangkat Daerah dan hal yang terkait bdengan perangkat Daerah: Khusus Provinsi, Uraikan mengenai koordinasi dan sinergi program perangkat daerah kabupaten serta dengan kementerian dan lembaga di*

- tingkat pusat dalam pencapaian kinerja pembangunan;*
2. *Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi perangkat daerah;*
 3. *Dampaknya terhadap pencapaian visi dan misi kepala daerah, capaian program nasional/ internasional, seperti: NSPK, SPM.*
- 2.4 *Review terhadap Rancangan Awal RKPD*, Berisikan uraian mengenai proses yang dilakukan yaitu membandingkan antara rancangan awal RKPD dengan hasil analisis kebutuhan; Penjelasan mengenai alasan proses tersebut dilakukan; dan penjelasan temuan-temuan setelah proses tersebut.
- 2.5 *Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat*, menguraikan hasil kajian terhadap program/kegiatan yang diusulkan para pemangku kepentingan, baik dari masyarakat, asosiasi-asosiasi, perguruan tinggi maupun berdasarkan pelaksanaan musrenbang

BAB III : TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

- 3.1 *Telaahan terhadap Kebijakan Nasional dan Provinsi*, memuat penelaahan yang menyangkut arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional dan tugas pokok dan fungsi OPD.
- 3.2 *Tujuan dan sasaran Renja OPD*, didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi OPD yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja Renstra OPD.
- 3.3 *Program dan Kegiatan*, memuat faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan, Uraian garis besar mengenai rekapitulasi program dan kegiatan, total kebutuhan dana/pagu indikatif, dan penjelasan jika rumusan program dan kegiatan tidak sesuai dengan rancangan awal RKPD.

BAB IV : RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

- 4.1 Rencana kerja diskominfo kab.Pasbar merupakan dokumen perencanaan program kegiatan tahun 2021 sebagai acuan bagi organisasi perangkat daerah dan masyarakat. Bagi satuan kerja pelaksana program RKPD tahun 2021 yang di tindak lanjuti dengan menyusun kebijakan publik baik dalam rangka deregulasi maupun kerangka anggaran dalam APBD tahun 2021.

BAB V PENUTUP

Memuat Catatan penting yang perlu mendapat perhatian, baik dalam rangka pelaksanaannya maupun seandainya ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan, Kaidah-kaidah pelaksanaan, dan rencana tindak lanjut

BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun Lalu dan Capaian Renstra OPD

Evaluasi terhadap pelaksanaan Renja OPD bertujuan untuk menilai apakah program-program pembangunan telah dilaksanakan sesuai dengan target kinerja OPD yang telah ditetapkan dalam dokumen Rencana Strategis (Renstra) SKPD. Evaluasi juga diperlukan untuk mengetahui permasalahan atau kendala-kendala yang dihadapi dalam pencapaian target kinerja, dan sebagai bahan pertimbangan untuk merumuskan rencana kerja program pada tahun anggaran berikutnya berdasarkan tolok ukur yang telah ditetapkan.

Berdasarkan UU nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, komunikasi dan informatika merupakan salah satu urusan pemerintahan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar sehingga untuk mengakomodir pelaksanaan tugas/urusan wajib tersebut Kabupaten Pasaman Barat melaksanakannya dengan penetapan Dinas Daerah yang melaksanakan tugas bidang Komunikasi dan Informatika. Sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 21 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, Dinas Komunikasi dan Informatika menjadi satu Organisasi Perangkat Daerah (OPD) bertipe A yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informatika dan bidang persandian yang mulai secara teknis pada tanggal 1 Januari 2017. Sebelumnya sampai akhir Desember 2016 sebelumnya urusan komunikasi dan informatika dilaksanakan oleh Bidang Komunikasi dan Informatika yang bergabung dengan Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika dan Bagian Humas Sekretariat Daerah Kabupaten Pasaman Barat.

Adapun informasi yang akan didapatkan melalui evaluasi pelaksanaan Renstra Diskominfo tahun 2017 adalah sebagai berikut:

- a. Kurangnya pengoptimisasinya pengaplikasian program – program yang berkaitan dengan peningkatan kualitas dan kuantitas pada Kominfo sendiri, dimana program program tersebut menunjang

- keberhasilan atau kemajuan unsur pendukung tugas Bupati di bidang Komunikasi, informatika dan bidang persandian.
- b. Realisasi program/kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan, karena kurangnya anggaran yang dibutuhkan pada bidang – bidang Komunikasi dan Informatika.
 - c. Terdapat beberapa Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya atau melebihi target kinerja program/kegiatan.
 - d. Implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra OPD
 - e. Kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut.

Adapun realisasi capaian kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika pada tahun 2019 serta perkiraan capaian kinerja tahun berjalan (TA 2020) disajikan pada tabel 2.1 berikut :

TABEL T-C.29

**REKAPITULASI EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RENJA PERANGAKAT DAERAH DAN
PENCAPAIAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH s/d TAHUN 2020 KABUPATEN PASAMAN BARAT**

DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

KODE			Urusan/ Bidang Urusan pemerintah Daerah Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program(Outcomes)/ Kegiatan(Output)	Target Kinerja Capaian Program (RENSTRA Perangkat Daerah) Tahun 2021	Realisasi Target Kinerja hasil Program dan keluaran kegiatan s/d 2019	Terget dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2020			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2021)	Perkiraan Realisasi Capaian Target RENSTRA Perangkat daerah s/d Tahun berjalan	
							Target RENJA Perangkat Daerah tahun 2020	Realisasi Renja Perangkat daerah Tahun 2020	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan kegiatan s/d tahun berjalan Tahun 2021	Tingkat Capaian Realisasi RENSTRA (%)
1		2		3	4	5	6	7	8= (7/6)	9	10= [5+7+9]	11=10/4
02	10	02	10	Urusan Wajib Bukan pelayanan Dasar								
02	10	01		Urusan Kominfo								
10	01	01	15	Program pengembangan komunikasi,informasi dan media massa	Persentase fasilitasi koordinasi PPID dan penanganan pengaduan masyarakat	32 OPD	95%	32 OPD	30 OPD	94%	32 OPD	100%
					Jumlah Blankspot area	5 Area	5%	50%	20%	10,0%	20%	20%
10	01	15	03	Pembinaan dan Pengembangan Jaringan Komunikasi dan Informasi	Jumlah jorong yang di fasilitasi untuk bantuan Menara BTS	-35 Jorong	5%	50%	20%	10%	20%	20%
					Interkoneksi jaringan intranet antar OPD	31 OPD - 11 Kecamatan - 19 Nagari - 20 Puskesmas	60%	100%	100%	40%	100%	100%
10	01	15	06	Perencanaan dan pengembangan kebijakan komunikasi dan informasi	Jumlah kelompok komunikasi dan informasi yang dibina	25 Kelompok	100%	100%	65%	75%	100%	100%

10	01	15	09	Penguatan Kelembagaan PPID	Jumlah sosialisasi penguatan kelembagaan PPID yang dilaksanakan	100%	84,38%	32 OPD	30 OPD	94%	32 OPD	100%	100%
10	01	15	11	Peliputan Kegiatan Pemerintah Daerah	Terlaksananya pemberitaan dan terpublikasinya kegiatan Pemerintah Daerah	100%	0	200 Berita	182 Berita	91%	225 Berita	407 Berita	100%
10	01	18		Program Kerjasama Informasi dan Media Massa	Tersampaikan Informasi tersebut kepada masyarakat	7 Media Online	-	-	90%	80%	100%	100%	100%
10	01	18	01	Penyebarluasan Informasi Pemcanganan Daerah	Jumlah media yang terpublikasi	7 Media Online	-	-	90%	80%	100%	100%	100%
10	01	19		Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi	Leveling SPBE	Level 3	Level 1	Level 1	Level 1	100%	Level 2	Level 2	100%
10	01	19	01	Pengembangan E-Government	Terlaksananya pengembangan E-Governmenrt	-	-	-	-	-	-	-	-
10	01	19	04	Layanan pengembangan dan pengelolaan Aplikasi	Jumlah soisialisasi E-Absen, E-SPPD, dan Aplikasi berbagi pakai lainnya	4 Kali	6 Kali	10 Kali	70%	70%	20 kali	15 Kali	75%
					Honorarium tenaga IT	3 Orang	3 Orang	3 Orang	3 orang	100%	40 Orang	40 Orang	100%
					Jumlah penambahan tenaga IT	4 Orang	3 Orang	3 Orang	1 Orang	65%	3 Orang	33%	65%
10	01	20		Program Persandian dan Pengamanan Informasi Daerah	Persentase persandian dan pengamanan informasi Daerah	100%	1,92%	-	-	-	40%	41,92%	0,4192%

10	01	20	01	Pengelolaan dan perlindungan informasi daerah	Jumlah sosialisasi persandian dan Pengamanan Informasi Daerah yang dilaksanakan	3 Kali	3 Kali	-	-	3 Kali	1 Kali



2.2. Analisis Kinerja Pelayanan OPD

Kajian terhadap capaian kinerja pelayanan Dinas Komunikasi dan Informatika dilakukan berdasarkan indicator kinerja yang sesuai dengan tugas dan fungsi Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pasaman Barat dalam mendukung pencapaian Misi Ke-5 dan Misi Ke-6 Pembangunan Daerah periode 2016-2021, Dibawah ini disajikan table analisis pencapaian kinerja pelayanan dengan format table T-C 30 sebagai berikut:

Tabel T- C.30 Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Komunikasi dan informatika Kab. Pasbar

No	Indikator	Target RENSTRA Perangkat Daerah				Capaian Realisasi		Proyeksi		Catt. Analisa
		2018	2019	2020	2021	2018	2019	2020	2021	
1	Opini laporan keuangan	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	
2	Level Maturitas SPIP	3	3	3	3	0	3,827	4	4	
3	Level Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	2	2	3	3	1,86	0	3	3	
4	Jumlah Jorong Blank Spot	35	23	14	5	5	0	14	5	

Dalam mewujudkan visi dan misi serta mencapai tujuan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pasaman Barat menetapkan sasaran kinerja yang merupakan acuan atau pedoman yang digunakan untuk menacapai tujuan. Sedangkan indikator kinerja merupakan suatu parameter yang digunakan untuk mengukur tingkat ketercapaian suatu sasaran yang ingin di capai.

Dalam pengukuran nilai indikator kinerja maka diperlukan data-data yang dapat merepresentasikan nilai dari capaian kinerja yang telah dilaksanakan. Nilai capaian kinerja dari setiap indikator yang diperoleh dari pengukuran yang dilakukan pada setiap triwulan kemudian dimonitor dan dievaluasi untuk menyempurnakan dan memastikan kevalidan perolehan nilai capaian yang akan dilaporkan. Pada tabel berikut dapat dilihat rincian teknik pengumpulan data serta teknik monitoring dan evaluasi yang dilakukan pada setiap indikator sasaran.

2.3. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi OPD

- a. Dalam penyelenggaraan Tugas Pokok dan Fungsinya, Diskominfo Kabupaten Pasaman Barat dihadapkan pada sejumlah isu-isu penting yang berimplikasi pengembangan kelembagaan maupun sumberdaya melalui diklat teknis dan penjenjangan serta pendekatan yang terukur dan sistematis terhadap OPD yang terkait.
- b. Fasilitas Komunikasi dan Informatika belum dapat menjangkau daerah kabupaten Pasaman barat, baik ditempat-tempat strategis terutama di Jorong/nagari terpencil.
- c. Sumber daya manusia yang mempunyai basic pengetahuan di bidang komunikasi dan informatika belum mencukupi.
- d. Kepatuhan masyarakat terhadap Undang-Undang komunikasi belum membudaya sehingga masih harus selalu dikembangkan dan diawasi.
- e. Kurangnya sarana mobilitas aparat Dinas Komunikasi dan informatika.
- f. Kondisi kualitas dan kuantitas sarana dan pelayanan yang masih terbatas, walaupun setiap tahun terjadi peningkatan kegiatan di Bidang Komunikasi dan Informatika.
- g. Masih terbatasnya sarana penunjang untuk mengerakkan kegiatan komunikasi dan informatika seperti penerangan keliling, pemutaran film, dan sosialisasi kebijakan pemda serta penyiaran radio.

Untuk menghasilkan capaian kinerja yang sesuai dengan harapan, maka strategi pemecahan masalah yang dapat dilakukan antara lain :

- a. Perbaikan berbagai sarana dan prasarana komunikasi dan media massa mulai dari pusat sampai ke daerah pedesaan sehingga akan mendukung pemerataan distribusi informasi ,
- b. Peningkatan peranan pos dan telekomunikasi serta media massa melalui pemberdayaan sehingga terjalinnya kerjasama dan keterpaduan langkah dalam penyediaan informasi,
- c. Pembentukan pusat-pusat informasi yang dibutuhkan masyarakat serta pemberdayaan kelompok informasi yang tumbuh dari bawah akan sangat membantu makin meratanya pemahaman dan wawasan masyarakat terhadap informasi pembangunan,

- d. Perbaikan sistem pengelolaan informasi pembangunan dan penyebarannya melalui pemberdayaan teknologi informasi sehingga terwujud pemerintahan yang berbasis informasi (e-government).

Diharapkan melalui strategi-strategi tersebut diatas Diskominfo Kabupaten Pasaman Barat dapat mencapai tujuan Diskominfo Kabupaten Pasaman Barat selama tahun 2016-2021.

2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD

Pada tahun 2021, jumlah Plafon Belanja Langsung Sementara yang dialokasikan untuk Diskominfo Kabupaten Pasaman Barat adalah sebesar Rp. **6.525.786.457,-** (Enam Milyar Lima Ratus Dua Puluh Lima Juta Tujuh Ratus Delapan Puluh Enam Ribu Empat Ratus Lima Puluh Tujuh Rupiah). Adapun telaahan terhadap rancangan awal RKPD Tahun 2021 dapat disajikan pada Tabel berikut:

Tabel T-31
Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2021
Diskominfo Kabupaten Pasaman Barat

Nama SKPD: Diskominfo Pasaman Barat

N o.	Rancangan Awal RKPD tahun 2021					Hasil Analisis Kebutuhan tahun 2022					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/kegiatan	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif		
1.	Program penunjang urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Diskominfo	Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran	100%	3.436.461.602	Program penunjang urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran	100%	3.722.123.452		
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Diskominfo	Terpenuhinya belanja pegawai ASN dan non ASN	12 Bulan	2.718.592.982	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terpenuhinya belanja pegawai ASN dan non ASN	12 Bulan	2.718.592.982		
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Diskominfo	Terlaksananya Pengiriman ASN Untuk Mengikuti Bimtek Sosialisasi	12 Bulan	4.423.550	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Terlaksananya Pengiriman ASN Untuk Mengikuti Bimtek Sosialisasi	12 Bulan	25.000.000		
	Administrasi umum Perangkat Daerah	Diskominfo	Persentase Pelayanan Kebutuhan Adminitrasi Umum Perangkat Daerah	12 bulan	518.190.900	Administrasi umum Perangkat Daerah	Persentase Pelayanan Kebutuhan Adminitrasi Umum Perangkat Daerah	12 bulan	787.476.300		
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Diskominfo	Terlaksananya Pengadaan Barang Milik Daerah	12 Bulan	104.899.170	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Terlaksananya Pengadaan Barang Milik Daerah	12 Bulan	104.899.170		

	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemrintah Daerah	Diskominfo	Jumlah Barang Milik Daerah yang di Pelihara	20 Unit	90.355.000	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemrintah Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah yang di Pelihara	21 Unit	86.155.000	
2	Program Informasi dan Komunikasi Publik		<ul style="list-style-type: none"> - Terpenuhinya kebutuhan informasi pembangunan Informasi publik -Kerjasama dengan media harian, mingguan dan online - Mendorong KIM berkembang mandiri sebagai wahana informasi di masyarakat 	100%	1.042.899.145	Program Informasi dan Komunikasi Publik	<ul style="list-style-type: none"> - Terpenuhinya kebutuhan informasi pembangunan Informasi publik -Kerjasama dengan media harian, mingguan dan online - Mendorong KIM berkembang mandiri sebagai wahana informasi di masyarakat 	100%	1.247.400.790	
	Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota	Diskominfo	Persentase terpublikasinya Berita Pemerintah Daerah	2.064 Berita	1.042.899.145	Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase terpublikasinya Berita Pemerintah Daerah	2.114 Berita	1.247.400.790	
3	Program Aplikasi Informatika	Diskominfo	Levelling SPBE	Level 3	1.940.281.960	Program Aplikasi Informatika	Levelling SPBE	Level 3	2.206.227.080	
	Pengelolaan Nama Domain yang Telah di tetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah	Diskominfo	Jumlah Website dan sub Domain yang terkelola dan jumlah kantor yang terhubung jaringan intranet dan Internet	61 Titik	1.697.476.380	Pengelolaan Nama Domain yang Telah di tetapkan oleh Pemerintah Pusat dan	Jumlah Website dan sub Domain yang terkelola dan jumlah kantor yang terhubung jaringan intranet dan Internet	71 Titik	1.800.000.000	

	Darah Kabupaten / Kota					Sub Domain di Lingkup Pemerintah Darah Kabupaten / Kota				
	Pengelolaan E-Government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota	Diskominfo	Jumlah Aplikasi yang di Kelola dan di Kembangkan	3 Aplikasi	242.805.580	Pengelolaan E-Government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota	Jumlah Aplikasi yang di Kelola dan di Kembangkan	3 Aplikasi	406.227.080	
4	Program Penyelenggaraan dan statistik	Diskominfo	Persentase OPD yang menggunakan	75 %	-	Program Penyelenggaraan dan statistik	Persentase OPD yang menggunakan		390.343.000	
	Penyelenggaraan statistik dan sektoral	Diskominfo	Persentase OPD yang menggunakan	25 OPD		Penyelenggaraan statistik dan sektoral	Persentase OPD yang menggunakan		390.343.000	
5	Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi	Diskominfo	Pengoperasian Pusat Data	2 Kali Diklat Sendiman	106.143.750	Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi	Pengoperasian Pusat Data	3 Kali Diklat Sendiman	106.143.750	
	Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemrintah Daerah Kabupaten/ Kota	Diskominfo	Persentase Penggunaan Aplikasi Umum Berbagi Pakai	100%	67.711.750	Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemrintah Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase Penggunaan Aplikasi Umum Berbagi Pakai	100%	67.711.750	

Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi Antar Perangkat Daerah Kabupaten/Kota	pasbar	Persentase Keterhubungan Perangkat Daerah dalam Jaringan Komunikasi Sandi	80 %	38.432.000	Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi Antar Perangkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Keterhubungan Perangkat Daerah dalam Jaringan Komunikasi Sandi	80 %	38.432.000	
Jumlah				6.525.786.457,-				7.346.044.327,-	

Berdasarkan tabel di atas, terlihat bahwa Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pasaman Barat mengalokasikan dana anggaran Tahun 2022 sebesar **Rp. 7.346.044.327,-** (Tujuh Milyar Tiga ratus Empat Puluh Enam juta Empat Puluh Empat ribu Tiga Ratus Dua Puluh Tujuh Rupiah) dalam rangka mendukung pencapaian target kinerja sesuai Renstra Diskominfo dan RPJMD Periode 2016-2021.

2.5. Penelaahan Usulan Program Diskominfo

Adapun usulan Musrenbang Kecamatan pada Dinas Komunikasi dan Informatika adalah sebagai berikut:

No	Kecamatan	Usulan
1.	Kinali	<ul style="list-style-type: none"> - Pembangunan sarana telekomunikasi (dua unit) - Pembangunan sarana informasi nagari (ORARI) nagari Katiagan - Jaringan telepon (Nagari Kinali) Langgam Saiyo - Jaringan telepon (Nagari Kinali) Kajai - Pembangunan tower 2 unit
2.	Sungai Aur	<ul style="list-style-type: none"> - Website nagari (Jorong Koto Dalam) - Pemasangan jaringan wifi pada kantor camat sungai aur (Jorong Koto Dalam) - Pemasangan jaringan wifi pada kantor Badan Kerjasama Nagari (Jorong Koto Dalam)
3.	Koto Balingka	<ul style="list-style-type: none"> - Pengadaan tower telekomunikasi di Jorong Sikabau - Pengadaan tower telekomunikasi di Tamang Ampalu
4.	Sungai Beremas	Pembangunan tower dikawasan wisata dan penduduk di pulau panjang, Air Bangis
5.	Sasak Ranah Pasisie	Tower ada, wifi tidak aktif di kantor camat Kendala : Jaringan tidak ada
6.	Luhak Nan Duo	Tower ada, wifi tidak aktif di kantor camat Kendala : Jaringan tidak ada
7.	Gunung Tuleh	Tower ada, wifi tidak aktif di kantor camat Kendala : Jaringan tidak ada
8	Talamau	Pengembangan Web site dan Aplikasi
9	Ranah Batahan	Pengembangan Web site dan Aplikasi
10	Lembah Melintang	Pengembangan Web site dan Aplikasi
11	Pasaman	Pengembangan Web site dan Aplikasi

BAB III

TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, DAN KEGIATAN

3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional dan Provinsi

Pembangunan IPTEK (Ilmu Pengetahuan dan Teknologi) merupakan sumber terbentuknya iklim inovasi yang menjadi landasan bagi tumbuhnya kreativitas sumber daya manusia, yang pada gilirannya dapat menjadi sumber pertumbuhan dan daya saing ekonomi. Selain itu iptek (Ilmu Pengetahuan dan Teknologi) menentukan tingkat efektifitas dan efisiensi proses transformasi sumberdaya menjadi sumber daya baru yang lebih bernilai. Dengan demikian peningkatan kemampuan iptek (Ilmu Pengetahuan dan Teknologi) sangat diperlukan untuk meningkatkan standar kehidupan bangsa dan negara, serta kemandirian dan daya saing bangsa Indonesia di mata dunia.

Dalam mengantisipasi dan mengatasi hal tersebut, peran Komunikasi melalui Sistem Informasi sangatlah penting. Khususnya harus dapat menjalin proses Komunikasi yang harmonis dengan masyarakat dan Pemerintah Daerah tidak dapat berjalan sendiri dalam mengembangkan potensi daerahnya apabila tidak didukung oleh masyarakat begitu juga sebaliknya masyarakat tidak akan mendukung pemerintah, apabila tidak memiliki pengetahuan yang cukup akan kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah. Situasi dan kondisi ini akan memunculkan berbagai isu-isu strategis yang berkaitan dengan pertimbangan daerah baik yang bersifat internal maupun eksternal yang harus diantisipasi dan diatasi dengan sebaiknya, oleh karena itu pemerintah Kabupaten Garut berupaya memberikan pelayanan informasi kepada masyarakat melalui Dinas Komunikasi dan Informatika dengan seimbang melalui kegiatan dan tugas pokok dan fungsinya.

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja OPD

Untuk mendukung pelaksanaan prioritas pembangunan daerah tahun 2021, didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi DISKOMINFO yang dikaitkan dengan sasaran dan target

kinerja Renstra DISKOMINFO, dalam rangka memberikan arah dan tolok ukur yang jelas dari misi yang telah dirumuskan sehingga dapat menggambarkan secara spesifik indikator kinerja keberhasilan, maka dari setiap misi ditetapkan tujuan dan sasaran Renja DISKOMINFO Tahun 2021.

Adapun tujuan dan sasaran dari ke-5 (lima) misi DISKOMINFO Kabupaten Pasaman Barat tersebut adalah sebagai berikut :

Tabel 3.1.

**Tujuan Pembangunan yang Mengacu pada Misi Dinas Komunikasi dan
Informasi
Tahun 2016 – 2021**

No	Misi	Tujuan
1	Mengembangkan kemampuan sumberdaya untuk melaksanakan tugas secara profesional dalam bidang komunikasi dan informatika	Mewujudkan sumber daya aparatur yang profesional
2	Menyediakan sarana dan prasarana telekomunikasi yang cukup serta mengintegrasikan seluruh potensi yang tersedia untuk mendukung pendapatan daerah	Mewujudkan fasilitas komunikasi yang berkualitas
3	meningkatkan kapasitas layanan informasi dalam rangka mewujudkan masyarakat berbudaya informasi	Mewujudkan masyarakat berbudaya informasi
4	Meningkatkan daya jangkau infrastruktur komunikasi dan informatika untuk memperoleh aksebilitas masyarakat terhadap informasi dalam rangka mengurangi kesenjangan informasi	Meningkatkan komunikasi dan informatika semakin baik

5	Mendorong peningkatan aplikasi layanan publik dan industri aplikasi telematika dalam rangka meningkatkan nilai tambahan layanan informasi	Meningkatkan aplikasi layanan publik dan industri aplikasi telematika
---	---	---

Sumber : Diskominfo Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2017

3.3 Program dan Kegiatan

Secara umum, rencana program dan kegiatan Dinas Komunikasi dan Informatika Pasaman Barat Tahun 2022 tertuang dalam 4 (Empat) program yang terdiri dari 10(Sepuluh) kegiatan, seperti terlihat pada tabel berikut:

Tabel T-C.3.3

Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat daerah Tahun 2022
Dan Prakira maju Tahun 2023 Kabupaten Pasaman Barat
Dinas Komunikasi dan Informatika

KODE	Urusan/ Bidang	Rencana Tahun 2022					Prakira maju Rencana Tahun 2023			
		Indikator	Urusan	Kinerja	Lokasi	Target	Kebutuhan	Sumber	Catt. Target	Kebutuhan
	Pemerintah Daerah dan Program/ Kegiatan					Capaian Kinerja	Dana/ Pagu Indikatif	Penting	Capaian Kinerja	Dana/ Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	Program penunjang urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran	Pasbar	100%	3.722.123.452	APBD		100%	3.845.839.695	
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terpenuhinya belanja pegawai ASN dan non ASN	Pasbar	12 Bulan	2.718.592.982			12 Bulan	2.982.325.284	
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Terlaksananya Pengiriman ASN Kepegawaian Mengikuti Bimtek Sosialisasi	Pasbar	12 Bulan	25.000.000	APBD		12 Bulan	100.000.000	
	Administrasi umum Perangkat Daerah	Persentase Pelayanan Kebutuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Pasbar	12 bulan	787.476.300	APBD		12 bulan	796.613.993	
	Pengadaan Barang Milik Daerah Peningkang Urusan Pemerintah Daerah	Terlaksananya Pengadaan Barang Milik Daerah	Pasbar	12 Bulan	104.899.170	APBD		12 Bulan	105.598.161	

		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemrintah Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah yang di Pelihara	Pasbar	21 Unit	86.155.000	APBD		22 Unit	124.028.33
		Program Informasi dan Komunikasi Publik	<ul style="list-style-type: none"> - Terpenuhinya kebutuhan informasi pembangunan Informasi publik -Kerjasama dengan media harian, mingguan dan online - Mendorong KIM berkembang mandiri sebagai wahana informasi di masyarakat 	Pasbar	100%	1.247.400.790	APBD		100%	1.265.563.267
		Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota	Percentase terpublikasinya Berita Pemerintah Daerah	Pasbar	2.114 Berita	1.247.400.790	APBD		2.120 Berita	1.265.563.267
		Program Aplikasi Informatika	Levelling SPBE	Pasbar	Level 3	2.206.227.080	APBD		Level 3	2.239.320.486
		Pengelolaan Nama Domain yang Telah di tetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota	Jumlah Website dan sub Domain yang terkelola dan jumlah kantor yang terhubung jaringan intranet dan Internet	Pasbar	71 Titik	1.800.000.000	APBD		68 Titik	1.827.000.000
		Pengelolaan E-Government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota	Jumlah Aplikasi yang di Kelola dan di Kembangkan	Pasbar	3 Aplikasi	406.227.080	APBD		3 Aplikasi	412.320.486

	Program Penyelenggaraan dan statistik	Persentase OPD yang menggunakan	Pasbar	75%	390.343.000	APBD		75%	345.448.145
	Penyelenggaraan statistik dan sektoral	Persentase OPD yang menggunakan	Pasbar	25 OPD	390.343.000	APBD		25 OPD	345.448.145
	Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi	Pengoperasian Pusat Data	Pasbar	3 Kali Diklat Sendiman	106.143.750	APBD		3 Kali Diklat Sendiman	107.735.906
	Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase Penggunaan Aplikasi Umum Berbagi Pakai	Pasbar	100%	67.711.750	APBD		100%	68.727.426
	Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi Antar Perangkat Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase Keterhubungan Perangkat Daerah dalam Jaringan Komunikasi Sandi	Pasbar	80 %	38.432.000	APBD		85 %	39.008.480
JUMLAH					Rp. 7.346.044.327,-			Rp. 7.873.222.499,	

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Rencana kerja(Renja) Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pasaman Barat merupakan dokumen perencanaan program kegiatan tahun 2022 sebagai acuan bagi Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan masyarakat. Bagi satuan kerja pelaksana program RKPD Tahun 2022 yang ditindak lanjuti dengan menyusun kebijakan publik baik dalam kerangka deregulasi maupun kerangka anggaran dalam APBD Tahun 2022 yang dalam pelaksanaannya dengan memaksimalkan sumber daya yang ada terutama sumber daya anggaran.

Mengingat keterbatasan sumber daya anggaran pelaksanaan program kegiatan yang ditetapkan dalam RKPD Tahun 2022 dan kebijakan umum APBD. Prioritas dan Plafon anggaran sementara APBD Tahun 2022 masih dalam tahap perencanaan. Pelaksanaan kegiatan RKPD Tahun 2022 harus dilakukan secara efektif dan efisien, untuk itu diperlukan upaya keterpaduan dan sinergitas antar satuan kerja maupun satuan kerja dengan masyarakat pada umumnya.

Untuk mencapai keterpaduan dan sinkronisasi kegiatan yang telah diprogramkan dilakukan dengan memanfaatkan forum perencanaan, rapat koordinasi maupun penjaringan aspirasi masyarakat sehingga tercapai sinergi dalam pelaksanaannya dengan menerapkan prinsip – prinsip safe guarding yaitu transparansi , akuntabilitas dan partisipasi serta monitoring dan evaluasi.

Penerapan prinsip safe guarding akan berhasil bila didukung oleh peran serta masyarakat dalam perancangan dan perumusan kebijakan yang dituangkan dalam bentuk regulasi. Masyarakat juga dapat berperan serta untuk mengawasi pelaksanaan kebijakan dan kegiatan dalam program – program pembangunan sehingga keterlibatan masyarakat merupakan faktor penting bagi terwujudnya kegiatan yang berkesinambungan.

Untuk menjaga efektifitas pelaksanaan program kegiatan, maka monitoring dan evaluasi harus menjadi kegiatan yang tak terpisahkan dari keseluruhan proses pelaksanaan program kegiatan pada setiap tahapan, agar diperoleh hasil yang maksimal serta sebagai umpan balik bagi perencanaan program kegiatan tahap berikutnya. Rencana kerja dan pendanaan Program dan Kegiatan Tahun 2021 dan Tahun 2022 dapat dilihat pada Tabel berikut :

**Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Pasaman Barat**
Tahun 2021

Unit Organisasi : 2.16.2.21.0.00.01.0000 Dinas Komunikasi dan Informatika

Sub Unit Organisasi : 2.16.2.21.0.00.01.0000 Dinas Komunikasi dan Informatika

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2021						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022										
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)									
						Progra m	Keluara n Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target									
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																						
2 16		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA										6.419.642.707			7.742.238.027							
2 16 01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA										3.436.461.602			3.722.123.452							
2 16 01 2.0 2	2.0 2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah										2.718.592.982			2.718.592.982							
2 16 01 2.0 2 01	2.0 2 01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase terpenuhinya kegiatan penunjang operasional perangkat daerah	Jumlah Penyediaan gaji dan tunjangan ASN	Terpenuhinya Gaji dan Tunjangan ASN/PNS Diskominfo	Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	20 orang	Dapat Terealisasi 100 %	2.443.120.456	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat		Persentase terpenuhinya kegiatan penunjang operasional perangkat daerah	100 %	2.443.120.456							
2 16 01 2.0 2 02	2.0 2 02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Persentase terpenuhinya kegiatan penunjang operasional perangkat daerah	Jumlah Non PNS (PTT/THL) penunjang administrasi perkantoran	Terpenuhinya Kebutuhan dan Gaji PTT dan THL	Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	1 ptt 14 thl	Dapat Terealisasi 100 %	174.850.000	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat		Persentase terpenuhinya kegiatan penunjang operasional perangkat daerah	100 %	174.850.000							
2 16 01 2.0 2 03	2.0 2 03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Persentase terpenuhinya kegiatan penunjang operasional perangkat daerah	Jumlah pejabat pengelola keuangan yang menerima honorarium	Terpenuhinya Honor Pejabat Pengelola Keuangan	Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	8 orang	Dapat Terealisasi 100 %	100.6228.752	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat		Persentase terpenuhinya kegiatan penunjang operasional perangkat daerah	100 %	100.6228.752							
2 16 01 2.0 5	2.0 5	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah										4.423.550			25.000.000							

Unit Organisasi : 2.16.2.21.0.00.01.0000 Dinas Komunikasi dan Informatika

Sub Unit Organisasi : 2.16.2.21.0.00.01.0000 Dinas Komunikasi dan Informatika

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Capaian Program	Indikator Kinerja Kinerja	Rencana Tahun 2021				Prakiraan Maju Rencana T		
				Lokasi Output Kegiatan	Program m	Keluara n Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan n	Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana	Catatan Penting
2 16 01 2.0 11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundangan	Percentase terpenuhinya kegiatan penunjang operasional perangkat daerah	Dapat Mengikuti Bimtek Lakip, LPPD dan KLIHS	Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamata n, Semua Keluraha n			Dapat Terealisasi 100 %	4.423.550	Pendapa tan Transfer Pemerin tah Pusat	Percentase terpenuhinya kegiatan penunjang operasional perangkat daerah 100 %
2 16 01 2.0 01	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah pemenuhan kebutuhan penerangan dan instalasi listrik penunjang operasional perangkat daerah	Terpenuhinya Kebutuhan Penunjang Operasional Kantor	Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamata n, Semua Keluraha n			Dapat Terealisasi 100 %	3.890.300	Pendapa tan Transfer Pemerin tah Pusat	Percentase terpenuhinya kegiatan penunjang operasional perangkat daerah 100 %
2 16 01 2.0 02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Percentase terpenuhinya kegiatan penunjang operasional perangkat daerah	Terpenuhi Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamata n, Semua Keluraha n			Dapat Terealisasi 100 %	3.42.937.800	Pendapa tan Transfer Pemerin tah Pusat	Percentase terpenuhinya kegiatan penunjang operasional perangkat daerah 100 %
2 16 01 2.0 03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Percentase terpenuhinya kegiatan penunjang operasional perangkat daerah	Terpenuhinya Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamata n, Semua Keluraha n			Dapat Terealisasi untuk Kantor	1.947.300	Pendapa tan Transfer Pemerin tah Pusat	Percentase terpenuhinya kegiatan penunjang operasional perangkat daerah 100 %

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Pasaman Barat
Tahun 2021

Unit Organisasi : 2.16.2.21.0.00.01.00000 Dinas Komunikasi dan Informatika

Sub Unit Organisasi : 2.16.2.21.0.00.01.00000 Dinas Komunikasi dan Informatika

Kode	Urusan/ Bidang	Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2021			Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		
			Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
2 16 01 2.0 9 02	Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan					Kelurahan					
2 16 01 2.0 9 06	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Persentase terpenuhinya kegiatan penunjang operasional perangkat daerah	Jumlah kendaraan dinas yang mendapat pemeliharaan dan pembayaran pajak/ KIR	Pemeliharaan kendaraan dinas roda empat dan roda dua	Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Telah terpeliharaanya kendaraan dinas roda empat dan roda dua	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	Persentase terpenuhinya kegiatan penunjang operasional perangkat daerah	73.325.000	100 %	73.325.000
2 16 01 2.0 9 09	Peneliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Persentase terpenuhinya kegiatan penunjang operasional perangkat daerah	Jumlah peralatan dan mesin yang dipelihara	Pemeliharaan laptop, personal computer, ac, printer	Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Telah terpeliharaanya laptop, personal computer, ac, printer	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	Persentase terpenuhinya kegiatan penunjang operasional perangkat daerah	7.830.000	100 %	7.830.000
2 16 02 2.0 1	PROGRAM INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	Pemeliharaan & habilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung kantor dan bangunan lain yang dipelihara	Pemeliharaan pintu kepala dinas	Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Telah terpeliharaanya pintu kepala dinas	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	Persentase terpenuhinya kegiatan penunjang operasional perangkat daerah	4.500.000	100 %	4.500.000
									1.042.899.14		1.042.899.14
									5		5
											1.317.400.79
											0
											1.317.400.79
											0

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Pasaman Barat
Tahun 2021

Unit Organisasi : 2.16.2.21.0.00.01.0000 Dinas Komunikasi dan Informatika

Sub Unit Organisasi : 2.16.2.21.0.00.01.0000 Dinas Komunikasi dan Informatika

Kode	Urusan/ Bidang Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2021			Prakiraan Maju Rencana Kinerja		
					Target Output Kegiatan	Program Keluara n Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan n	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana	Catatan Penting	Tolok Ukur	Target
2 16 02 2.0 01	Perumusan Kebijakan Teknis Bidang Informasi dan Komunikasi Publik	Jumlah diseminasi informasi Pemerintah Daerah melalui media cetak dan elektronik	Jumlah peraturan Bupati tentang website Daerah	Media cetak dan elektronik	Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Program Keluara n Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan n	1 dokumen	Media cetak dan elektronik yang terbitkan	Pendapa tan Transfer Pemerintah Pusat	Jumlah diseminasi informasi Pemerintah Daerah melalui media cetak dan elektronik	100 %	5.000.000
2 16 02 2.0 02	Monitoring Opini dan Aspirasi Publik	Jumlah diseminasi informasi Pemerintah Daerah melalui media cetak dan elektronik	Jumlah monitoring opini dan aspirasi publik	Penyaluran informasi melalui wartawan	Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Program Keluara n Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan n	1 kali	Telah di salurkan informasi melalui wartawa n	Pendapa tan Transfer Pemerintah Pusat	Jumlah diseminasi informasi Pemerintah Daerah melalui media cetak dan elektronik	100 %	5.000.000
2 16 02 2.0 03	Monitoring Informasi dan Penetapan Agenda Prioritas Komunikasi Pemerintah Daerah	Jumlah diseminasi informasi Pemerintah Daerah melalui media cetak dan elektronik	Jumlah Monitoring Informasi dan Penetapan Agenda Prioritas Komunikasi Pemerintah Daerah	Media cetak dan elektronik	Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Program Keluara n Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan n	1 kali	Media cetak dan elektronik yang terbitkan	Pendapa tan Transfer Pemerintah Pusat	Jumlah diseminasi informasi Pemerintah Daerah melalui media cetak dan elektronik	100 %	5.000.000
2 16 02 2.0 04	Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik	Jumlah diseminasi informasi Pemerintah Daerah melalui media cetak dan elektronik	Jumlahberita yang terpublikasi	Meliput kegiatan pimpinan daerah, OPD dan lainnya	Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Program Keluara n Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan n	Telah dilaksan akan kegiatan meliput pimpinan daerah, OPD dan Lainnya	Pendapa tan Transfer Pemerintah Pusat	Jumlah diseminasi informasi Pemerintah Daerah melalui media cetak dan elektronik	100 %	447.531.790	
2 16 02 2.0 05	Pengelolaan Media	Jumlah diseminasi informasi	Jumlah media komunikasi publik	Kab. Pasaman	Program Keluara n Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan n	1 media	3.000,000	Pendapa tan	Jumlah diseminasi informasi	100 %	70.000.000	

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Pasaman Barat
Tahun 2021

Unit Organisasi : 2.16.2.21.0.00.01.00000 Dinas Komunikasi dan Informatika

Sub Unit Organisasi : 2.16.2.21.0.00.01.00000 Dinas Komunikasi dan Informatika

Kode	Urusan/ Bidang	Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Indikator Kinerja		Rencana Tahun 2021				Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022				
						Lokasi Output Kegiatan	Program	Keluara n Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana	Catatan Penting	Target Capaian Kinerja	Tolok Ukur	Target
2 16 02 2.0 06	1	Komunikasi Publik/Pasbar	Pemerintah Daerah melalui media cetak dan elektronik	yang di kelola	kerja sama dengan media cetak dan online	Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Kerja sama dengan media	1	Terlaksana nanya kerjasama dengan media cetak dan online	Transfer Pemerintah Pusat	Pemerintah Daerah melalui media cetak dan elektronik					
2 16 02 2.0 07	1	Pelayanan Informasi Publik	Jumlah diseminasi informasi Pemerintah Daerah melalui media cetak dan elektronik	jumlah kegiatan pelayanan komunikasi publik	Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	1	kegiatan dengan operator PPID/kec amatan	Penguat an PPID dengan berkerjas ma dengan operator PPID/kec amatan	21.569.000	Pendapa tan Transfer Pemerintah Pusat	Jumlah diseminasi informasi Pemerintah Daerah melalui media cetak dan elektronik	100 %	21.569.000		
2 16 02 2.0 08	1	Layanan Hubungan Media	Jumlah diseminasi informasi Pemerintah Daerah melalui media cetak dan elektronik	Jumlah jenis kerjasama layanan media massa	Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	7	media cetak dan media 2 online ramah	Penguat an kerjasama atau diseminasi dan temu ramah	528.925.000	Pendapa tan Transfer Pemerintah Pusat	Jumlah diseminasi informasi Pemerintah Daerah melalui media cetak dan elektronik	100 %	601.300.000		

**Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Pasaman Barat
Tahun 2021**

Unit Organisasi : 2.16.2.21.0.00.01.0000 Dinas Komunikasi dan Informatika

Sub Unit Organisasi : 2.16.2.21.0.00.01.0000 Dinas Komunikasi dan Informatika

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2021						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)	
						Progra m	Keluara n Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Target		
2 16 02 2.0 10	Penguatan Kapasitas Sumber Daya Komunikasi Publik	Jumlah diseminasi informasi Pemerintah Daerah melalui media cetak dan elektronik	Jumlah peserta sosialisasi	Penguatan PPID melalui aplikasi	Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	200 peserta	Telah dilaksanakan penguatan PPID Melalui APIkasi	2,500,000	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat		Jumlah diseminasi informasi Pemerintah Daerah melalui media cetak dan elektronik	100 %	5.000.000
2 16 02 2.0 11	Penguatan Tata Kelola Komisi Informasi di Daerah	Jumlah diseminasi informasi Pemerintah Daerah melalui media cetak dan elektronik	Jumlah kegiatan penilaian komisi informasi	koordinasi dan pembinaan oleh KI sumbar	Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	1 kegiatan	Sudah dilaksanakan koordinasi dan pembinaan oleh KI sumbar	2,000,000	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat		Jumlah diseminasi informasi Pemerintah Daerah melalui media cetak dan elektronik	100 %	17.000.000
2 16 02 2.0 12	Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat, Media dan Kemitraan	Jumlah diseminasi informasi Pemerintah Daerah melalui media cetak dan elektronik	Jumlah KIM yang dikembangkan dan berdayakan	Pembinaan kelompok KIM	Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	10 kelompok	Telah dilaksanakan pembinaan terhadap kelompok KIM	93,130,000	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat		Jumlah diseminasi informasi Pemerintah Daerah melalui media cetak dan elektronik	100 %	115.000.000
2 16 03		PROGRAM APLIKASI INFORMATIKA						1.940.281.960						2.206.227.080
2 16 03 2.0 1	Pengelolaan Nama Domain yang telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota							1.697.476.380						1.800.000.000
2 16 03 2.0 03	Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah	Leveling SPBE	Jaringan Inofrmasi yang terhubung Jumlah domain sub domain	Sudah terhubung ke OPD, kecamatan dan puskesmas	Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua	NA Level	61 Titik 52 Sub Domain	Sudah terhubung ke OPD, kecamatan dan puskesmas	1.697.476.380	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat		Leveling SPBE	NA Level	1.800.000.000

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Pasaman Barat
Tahun 2021

Unit Organisasi : 2.16.2.21.0.00.01.0000 Dinas Komunikasi dan Informatika

Sub Unit Organisasi : 2.16.2.21.0.00.01.0000 Dinas Komunikasi dan Informatika

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2021						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022			
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)	
						Progra m	Keluara n Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target		
2 16 03 2.0 2	Pengelolaan e-government Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota				Kelurahan				242.805.580					406.227.080	
2 16 03 2.0 03 2	Pengelolaan Pusat Data Pemerintahan Daerah	Leveling SPBE	Jumlah pengelola pusat data	Melalui aplikasi Data	Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	NA Level	3 orang	Melalui aplikasi Data	127.316.000	Pendapa tan Transfer Pemerin tah Pusat		Leveling SPBE	NA Level	227.316.000	
2 16 03 2.0 07 2	Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik	Leveling SPBE	Jumlah Aplikasi yang di kembangkan	Leveling SPBE pasaman barat	Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamata n, Semua Keluraha n	NA Level	3 aplikasi	Meningkt anya Level SPBE pasaman Barat > 2,8	115.489.580	Pendapa tan Transfer Pemerin tah Pusat		Leveling SPBE	NA Level	178.911.080	
	Program penyelengaraan statistik													390.343.000	
	Penyelengaraan statistik sektoral di lingkup Daerah Kabupaten / Kota													390.343.000	
	Koordinasi dan Sinkronisasi pengumpulan, Pengolahan, Analis dan diseminasi data statistik sektoral	Jumlah rapat koordinasi Statistik Sektoral	4 Kali	Belum terlaksana di tahun 2021	Kab. Pasaman Barat, Semua kecamatan, semua nagari					Pendapa		Jumlah rapat koordinasi Statistik Sektoral	4 Kali	75.000.000	
	Peningkatan kapasitas SDM Pemda dalam Peningkatan Mutu Statistik daerah yang terintegrasi	Jumlah Bimtek yang dilaksanakan	133 SDM Pengelolaan Data	Belum terlaksana di tahun 2021	Kab. Pasaman Barat, Semua kecamatan, semua nagari					Pendapa		Jumlah Bimtek yang dilaksanakan	133 SDM Pengelola an Data	165.343.000	

Membangun metadata statistik Sektoral	Penyusunan Metadata Kegiatan Statistik Sektor	79.33 00.000,00	Penyusunan Metadata Kegiatan Statistik Sektor	100.000.000
	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Statistik sektoral	133 Nagari	Kab. Pasaman Barat, Semua kecamatan, semua nagari	133 Nagari
2.21	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Statistik sektoral	133 Nagari	Kab. Pasaman Barat, Semua kecamatan, semua nagari	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Statistik sektoral
	Penyusunan Metadata Kegiatan Statistik Sektor	Belum terikatansi di tahun 2021	Belum terikatansi di tahun 2021	Produesen Data Sektoral, dan Nagari Statistik
2.21.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN	106.143.750		106.143.750
2.21.02.0	PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	106.143.750		106.143.750
2.21.02.0.1	Penyelegaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	67.711.750		67.711.750
2.21.02.0.2	Pelaksanaan Analisis Kebutuhan dan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi Pemerintah Daerah	Persentase kebersediaan Sapras Persandian dan Jumlah SDM Keahlian Persandian	Sumber Daya Manusia Jumlah sistem keamanan informasi yang dapat yang dapat di tanggulangi/ di pulihkan	Pendapa tan Transfer Pemerintah daerah
2.21.02.0.2.1	1	50 %	1 sistem	51.201.750
		50 %		51.201.750

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
 Kabupaten Pasaman Barat
 Tahun 2021

Unit Organisasi : 2.16.2.21.0.00.01.0000 Dinas Komunikasi dan Informatika

Sub Unit Organisasi : 2.16.2.21.0.00.01.0000 Dinas Komunikasi dan Informatika

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Capaian Program	Indikator Kinerja		Rencana Tahun 2021			Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022				
			Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Program	Keluara n Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan n	Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana	Target Capaian Kinerja	Tolok Ukur
2 21 02 2 0 3 1	Kabupaten/Kota	Pelaksanaan Keanamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	Pengamanan informasi dengan melalui kerjasama dengan BSSN	Jumlah sistem elektronik yang telah memanfaatkan sertifikat elektronik	Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Belum ada SDm (Sandim an)	Belum ada SDm (Sandim an)	1 aplikasi	16.675.100	Pendapa tan Transfer Pemerintah Pusat	Percentase ketersediaan Sipras Persandian dan Jumlah SDM Keahlian Persandian	16.510.000
2 21 02 2 0 2 2	Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi Antar Perangkat Daerah Kabupaten/Kota	Operasionalisasi Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Percentase ketersediaan Sipras Persandian dan Jumlah SDM Keahlian Persandian	Jumlah SDM yang melakukan BIMTEK jaring komunikasi sand yang dilaksanakan oleh BSSN	Belum tersedia SDM	Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Belum tersedia SDM	1 orang	38.432.000	Pendapa tan Transfer Pemerintah Pusat	Percentase ketersediaan Sipras Persandian dan Jumlah SDM Keahlian Persandian	38.432.000
										TOTAL	6.525.786.45	7.742238.072

BAB V

PENUTUP

Dokumen Rencana Kerja (Renja) Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2021 akan digunakan sebagai acuan dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan pada tahun 2022. Tentu saja, keberhasilan pelaksanaan program dan kegiatan yang termuat dalam Rencana Kerja ini sangat bergantung kepada komitmen dan kerjasama semua pihak yang terkait. Diperlukan upaya koordinasi yang lebih intense antar semua pihak sehingga program dan kegiatan bisa dilaksanakan dengan baik.

Selain itu, diperlukan komitmen semua pihak terkait tindak lanjut dari segala kegiatan yang dilaksanakan. Mengingat tugas pokok dan fungsi Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pasaman Barat sebagai OPD yang bertanggung jawab memberikan keyakinan yang memadai.

Atas ketataan, kehematan, efisiensi, dan efektivitas pencapaian tujuan penyelenggaraan tugas dan fungsi Instansi Pemerintah; memberikan peringatan dini dan meningkatkan efektivitas manajemen risiko dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Instansi Pemerintah; dan memelihara dan meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan tugas dan fungsi instansi pemerintah, perlu merumuskan program/kegiatan ke depan, maka tindak lanjut (*follow up*) menjadi suatu keharusan. Dengan demikian, dokumen rencana yang telah disusun tidak hanya sebatas dokumen tanpa implikasi.

Tentu saja, Renja ini membutuhkan umpan balik (*feedback*) yang sangat diperlukan dalam pengambilan keputusan dan perumusan rencana program di masa mendatang. Dengan demikian, program-program pembangunan akan lebih terarah dan bersinergi untuk mendapatkan hasil yang lebih baik di masa mendatang melalui perencanaan yang terintegrasi.

Pasaman Barat, 06 Agustus 2021

KEPALA DISKOMINFO

KABUPATEN PASAMAN BARAT



Edy Murdani, SH
Pembina Utama Muda/IV.c
NIP. 19670822 198803 1 004



**SURAT KEPUTUSAN
KEPALA DISKOMINFO KABUPATEN PASAMAN BARAT
NOMOR :188.4 /024/DISKOMINFO/I/2021**

TENTANG

**RENCANA KERJA (RENJA) DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KABUPATEN PASAMAN BARAT TAHUN 2022**

**KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KABUPATEN PASAMAN BARAT**

Menimbang : a. bahwa berdasarkan Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, bahwa Rencana Pembangunan Jangka Menengah Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renstra OPD adalah dokumen perencanaan organisasi perangkat daerah untuk periode jangka menengah daerah;
b. bahwa Rencana Kerja (Renja) OPD memuat program dan kegiatan yang mendukung visi, misi, tujuan, strategi, dan kebijakan Pemerintah Daerah dan disusun sesuai dengan tugas pokok dan fungsi OPD serta berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Renstra OPD;
c. bahwa untuk melaksanakan ketentuan sebagaimana yang dimaksud pada huruf a dan b maka Rencana Kerja (Renja) Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2022, perlu ditetapkan dengan keputusan Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
2. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Dharmasraya, Kabupaten Solok Selatan dan Kabupaten Pasaman Barat di Provinsi Sumatera Barat;
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005 – 2025;
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
9. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 Tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD);
13. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 13 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2010 – 2030;
14. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016 – 2021;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 7 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2005 – 2025;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 18 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Tahun 2011-2031;
17. Peraturan Bupati Pasaman Barat Nomor 44 Tahun 2020 tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2020;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 14 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2016-2021;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 21 Tahun 2016 tentang Penetapan Organisasi Perangkat Daerah;
20. Peraturan Bupati Pasaman Barat Nomor 37 Tahun 2020 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2021.
21. Peraturan daerah Kabupaten Pasaman Barat No.2 tahun 2021 tentang Rencana pembangunan Jangka menengah Daerah tahun 2021-2026

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : (1) Rencana Kerja (Renja) Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2022 adalah dokumen perencanaan Dinas Komunikasi dan Informatika untuk periode 1 (satu) tahun yakni Tahun Anggaran 2022;
(2) Rencana Kerja (Renja) Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2022 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi pedoman dalam penyusunan Program dan Kegiatan DISKOMINFO Kabupaten Pasaman Barat pada Tahun Anggaran 2022.

KEDUA : Keputusan Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pasaman Barat tentang Rencana Kerja (Renja) Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2021 ini berlaku sejak tanggal ditetapkannya.

Ditetapkan di : Simpang Empat
Pada tanggal : 04 Januari 2021

